

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*Fraud*) menurut Sawyer (2006) adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan penyimpangan yang disengaja oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok. Menurut *Webster's New Dictionary*, *fraud* (kecurangan) diartikan sebagai "*fraud*" yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan seseorang menyerahkan hak milik atau haknya yang sah menurut hukum.

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) membagi kecurangan (*fraud*) dalam tiga jenis berdasarkan perbuatannya, yaitu: penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan rekayasa laporan keuangan (*Fraudulent Statement*), dan korupsi (*Corruption*). Tindakan- tindakan tersebut tentu saja sangat merugikan bagi perusahaan yang bersangkutan. Kasus kecurangan yang sering terjadi baik di instansi pemerintahan maupun instansi swasta adalah kasus korupsi. Di instansi pemerintah, kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada di bawahnya serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah.

Kasus kecurangan yang terjadi pada lingkungan pemerintah daerah yaitu tentang perjalanan dinas, dalam kegiatan perjalanan dinas masing-masing golongan mendapat kuota untuk melakukan perjalanan dinas, pejabat eselon II dan Staf mendapat kuota masing-masing sebanyak lima tetapi dalam pelaksanaannya hanya dua kuota yang digunakan sehingga sisanya 3 kuota merupakan tindakan *Fraud* yang dilakukan oleh pejabat eselon II dan stafnya. Dalam hal ini bukti perjalanan dinas seperti Tiket, Boarding Pass, Bill Hotel dan Blangko SPPD dibuat hanya untuk sebagai bukti pertanggung jawaban fiktif sehingga uang perjalanan dinas untuk 3 kuota digunakan untuk keperluan pribadi. Kecurangan menyangkut dengan Alat Tulis Kantor (ATK) juga terjadi pada lingkungan pemerintahan dimana dalam pembelanjaan ATK nota belanja dibuat melebihi kebutuhan kantor misalnya pembelian kertas dan tinta yang sebenarnya dibutuhkan hanya 2 Rim Kertas dan 2 Botol Tinta tetapi dalam nota belanja dicatat 5 Rim Kertas dan 4 Botol Tinta sehingga kelebihan anggaran untuk 3 Rim Kertas dan 2 Botol Tinta digunakan untuk menutupi dana sudah digunakan.

Kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kesempatan (*Opportunity*) atau peluang. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan lebih sering terjadi. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan monitoring dalam sebuah instansi dan untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, maka diperlukan pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2006). Keefektifan sistem pengendalian internal sangatlah penting dalam pelaksanaansuatu kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan atau instansi. Ketidakefektifan sistem pengendalian internal akan dapat membuka kesempatan bagi pegawai untuk melakukan tindakan yang menyimpang atau

kecurangan (*fraud*) karena pegawaiiakan memanfaatkan ketidakefektifan sistem pengendalian internal itu sebagai suatu titik lemah perusahaan atau instansi dan melancarkan aksinya dalam melakukan kecurangan (*fraud*).

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif yakni untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian bahwasanya untuk tercapainya tujuan pengendalian internal yang efektif dalam pemerintah diperlukan suatu langkah yang efektif di antaranya harus memiliki kapasitas individu yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pengendalian internal adalah representatif dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum (Tunggal 2011:3). Penegakan hukum/peraturan daerah harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka memajukan daerah tersebut termasuk dalam pengelolaan APBD. Peraturan itu sendiri termasuk salah satu pengendalian dari pemerintah daerah agar pengelolaan APBD tersebut berjalan secara transparan sesuai dengan kepentingan publik. Jika pengelolaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, akan memungkinkan terjadinya kecurangan dari orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan tersebut.

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan

maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Sistem hukum dapat menjadi *fraud* ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imparsialinstitusi. Secarakhusus, korupsi terjadi manakala seorang pejabat institusi mencari tau menerima keuntungan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya.

Menurut COSO 2004 dalam (Pramudita, 2013) mengatakan lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasitoris, nilai-nilai merekadan gaya manajemen atau kepemimpinannya, diargumentasikan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung untuk mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bias diterima sehingga dapat dikatakan bahwa dalam lingkungan yang etis yang dibentuk oleh gaya kepemimpinan yang baik, akan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang dilakukan karyawan. Sehingga untuk membentuk suatu lingkungan etis yang jauh dari tindakan *fraud* diperlukan sosok seorang figur pemimpin yang baik dimata karyawan, seorang karyawan yang mempunyai persepi yang buruk terhadap gaya kepemimpinan pemimpinnya, maka karyawan tersebut akan cenderung melakukan hal-hal yang akan merugikan perusahaan, dalam hal ini melakukan *fraud*.

Budaya etis organisasi merupakan suatu pola tingkah laku, kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi, tingkah laku disini merupakan suatu tingkah laku yang dapat diterima oleh moral dan benar secara hukum, didalam suatu budaya organisasi yang etis terdapat adanya suatu komitmen dan lingkungan yang etis pula. Komitmen organisasi tercakup unsur

loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Komitmen mempunyai penekanan yang hampir sama yaitu proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi.

Kecenderungan kecurangan juga dipengaruhi oleh besar tidaknya tekanan. Tekanan (*Pressure*) adalah motivasi dari individu untuk bertindak curang yang disebabkan oleh adanya tekanan keuangan maupun non keuangan, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi. Dalam lingkup entitas, baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan, faktor utama yang menyebabkan tekanan adalah ketidaksesuaian kompensasi. Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Dapat dikatakan kesesuaian kompensasi merupakan sesuatu imbalan yang didapat seorang karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya.

Penelitian yang dilakukan Pramudita (2013) menemukan bahwa Gaya Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Kesesuaian Kompensasi, Budaya Etis Organisasi dan Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan sedangkan Penelitian yang dilakukan Maryati dkk (2012) menemukan bahwa Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu. Zulkarnain (2013) menemukan bahwa Tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Aditya (2013) menemukan bahwa Kultur Organisasi dan Kepuasan akan Gaji tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Chintya (2015) menemukan

bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Ristanti dkk (2014) menemukan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Penerapan *Good Governance*.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Judul penelitian saat ini yaitu Faktor – Faktor yang mempengaruhi terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Persepsi Pegawai pada SKPD Kota Ternate). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pramudita (2013).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap *Fraud*?
2. Apakah Keefektifan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap *Fraud*?
3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap *Fraud*?
4. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap *Fraud*?
5. Apakah Budaya Etis Organisasi berpengaruh terhadap *Fraud*?
6. Apakah Penegakan Hukum berpengaruh terhadap *Fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap *Fraud*.
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud*.
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap *Fraud*.
4. Memperoleh bukti empiris pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud*.
5. Memperoleh bukti empiris pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap *Fraud*.
6. Memperoleh bukti empiris pengaruh Penegakan Hukum terhadap *Fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

4.1.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu tentang Faktor – Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *Fraud*.

4.1.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan referensi dan evaluasi guna peningkatan kinerja pegawai dalam hal *Fraud*.
2. Penelitian ini dapat membantu sebagai referensi tambahan mengenai Faktor-faktor terjadinya *Fraud*.
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu SKPD di Kota Ternate dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.